

**PENGARUH MEKANISME *CORPORATE*
GOVERNANCE DAN KARAKTERISTIK
PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA
LINGKUNGAN**

**(Studi Empiris pada Perusahaan yang Memiliki Peringkat pada
PROPER dan Terdaftar dalam BEI pada Tahun 2010 dan 2011)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

NINA YESIKA
NIM. C2C008096

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2013**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Nina Yesika
Nomor Induk Mahasiswa : C2C008096
Fakultas / Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGARUH MEKANISME CORPORATE
GOVERNANCE DAN KARAKTERISTIK
PERUSAHAAN TERHADAP
KINERJA LINGKUNGAN**

Dosen Pembimbing : Anis Chariri, S.E.,M.Com.,P.hD.,Akt

Semarang, 14 Februari 2013

Dosen Pembimbing,

(Anis Chariri,SE.,M.Com.,P.hD.,Akt)

NIP. 196708091992031001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Nina Yesika
Nomor Induk Mahasiswa : C2C008096
Fakultas / Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGARUH MEKANISME CORPORATE
GOVERNANCE DAN KARAKTERISTIK
PERUSAHAAN TERHADAP
KINERJA LINGKUNGAN**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 20 Februari 2013

Tim Penguji

1. Anis Chariri, S.E.,M.Com.,P.hD.,Akt (.....)
2. Dr. H. Agus Purwanto, M.Si,Akt (.....)
3. Dul Muid, S.E., M.Si.,Akt (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Nina Yesika Sembiring, menyatakan bahwa skripsi dengan judul “PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE DAN KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA LINGKUNGAN (Studi pada Perusahaan yang Memiliki Peringkat pada PROPER dan Terdaftar dalam BEI pada Tahun 2010 dan 2011)” adalah hasil karya saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut diatas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemungkinan terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 14 Februari 2013

Yang membuat pernyataan

(Nina Yesika)

NIM. C2C008096

ABSTRACT

This research aims to determine the impact of corporate governance mechanism and corporate characteristics to environmental performance. The proxy of corporate governance mechanism is size of board commissioner, proportion independence of board commissioner, and audit committee meeting. The proxy of corporate characteristic is profitability, leverage, and variety industri. Environmental performance is measured by PROPER rating that issued by Environmental Ministry.

Research design is quantitative method to determine the relationship between variables by testing hypothesis. The sample elected method is purposive sampling which companies listed in Indonesia Stock Exchange and PROPER in 2010 and 2011. The 23 corporate annual reports were analyzed as samples. The examined technique hypothesis is mutiple regression by using SPSS program.

The result of research is proportion independence of board commissioner and variety of industry had positive significant influence otherwise size of board commissioner had negative significant influence on environmental performance. Profitability, leverage and audit committee meeting had no significant influence on environmental performance. The result was not appropriate with legitimacy theory that state profitability and leverage had a negative significant influence on environmental performance.

Keyword : environmental performance, corporate governance, profitability, leverage, variety of industry, PROPER.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh mekanisme corporate governance dan karakteristik perusahaan terhadap kinerja lingkungan. Mekanisme corporate governance yang digunakan adalah ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, dan jumlah pertemuan komite audit. Karakteristik perusahaan yang digunakan adalah profitabilitas, leverage dan jenis industri. Kinerja lingkungan dinilai dengan menggunakan peringkat PROPER yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

Desain penelitian yang digunakan dengan metode kuantitatif yang menguji hubungan antar variabel melalui pengujian hipotesis. Metode pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling* pada perusahaan yang terdaftar dalam PROPER dan BEI pada tahun 2010 dan 2011. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 23 perusahaan. Teknik pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan menggunakan program SPSS.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa proporsi komisaris independen dan jenis industri berpengaruh positif sedangkan ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap kinerja lingkungan. Profitabilitas, leverage dan jumlah pertemuan komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja lingkungan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori legitimasi yang menyatakan profitabilitas dan leverage berpengaruh negatif terhadap kinerja lingkungan.

Kata kunci : kinerja lingkungan, corporate governance, profitabilitas, leverage, jenis industri, PROPER

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa melimpahkan rahmatNya sehingga penelitian dan penulisan skripsi ini dapat diselesaikan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini dapat terselesaikan karena adanya campur tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih atas bantuan dan dukungan yang begitu besar dar

1. Bapak Prof. H. Mohamad Nasir, M.Si., Akt.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
2. Bapak Anis Chariri, S.E.,M.Com.,Akt.,Ph.D selaku Dosen Pembimbing atas waktu, arahan, dan semua bimbingan kepada penulis selama penulisan skripsi ini. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
3. Bapak Puji Harto, S.E.,M.Si., Akt., Ph.D selaku Dosen Wali
4. Semua dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
5. Seluruh kerabat, teman, pihak-pihak yang sudah membantu namun tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas bantuan dan doanya.

Semarang, 14 Februari 2013

Penulis

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Setiap perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku (filipi 4:13)

Serahkanlah segala perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu (amsal 16:3)

Ora et Labora

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

- ♥ Bapa dan Sahabat ku di surga, Yesus Kristus
- ♥ Kedua orang tuaku (Erwin Sembiring dan Sariana Tarigan)
- ♥ Saudaraku (Elsa Natalina S, Edy Pidonta S, Eddy Putra Mayor dan Heni Eka) serta Keponakanku (Yorelio Nathaniel S dan Felicia Arteta S)
- ♥ Sahabat terbaikku

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORIGINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	13
2.1.1 Teori Legitimasi	13
2.1.2 Teori Agency	15
2.2 Kinerja Lingkungan.....	16
2.3 Penilaian Kinerja Lingkungan Menggunakan PROPER.....	17
2.4 Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)	19
2.4.1 Definisi Corporate Governance	19
2.4.2 Asas Corporate Governance	21
2.4.3 Mekanisme Corporate Governance	22

2.4.3.1 Dewan Komisaris.....	23
2.4.3.2 Komisaris Independen	24
2.4.3.3 Aktivitas Komite Audit	25
2.4.4 Sistem One Tier dan Two Tier	27
2.4.5 Karakteristik Perusahaan	29
2.4.5.1 Profitabilitas	29
2.4.5.2 Leverage	30
2.4.5.3 Jenis Industri	32
2.5 Penelitian Terdahulu.....	37
2.6 Kerangka Pemikiran Teoritis.....	37
2.7 Perumusan Hipotesis	38
2.7.1 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Kinerja Lingkungan	38
2.7.2 Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Kinerja Lingkungan	39
2.7.3 Pengaruh Aktivitas Komite Audit terhadap Kinerja Lingkungan	40
2.7.4 Pengaruh Profitabilitas terhadap Kinerja Lingkungan	40
2.7.5 Pengaruh Leverage terhadap Kinerja Lingkungan	41
2.7.6 Pengaruh Jenis Industri terhadap Kinerja Lingkungan	43

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 4 Variabel Penelitian dan Definisi Variabel Penelitian	44
3.1.1 Variabel Dependen	44
3.1.2 Variabel Independen.....	45
3.1.2.1 Ukuran Dewan Komisaris	45
3.1.2.2 Proporsi Komisaris Independen.....	45
3.1.2.3 Aktivitas Komite Audit.....	46
3.1.2.4 Profitabilitas.....	46
3.1.2.5 Leverage	46
3.1.2.6 Jenis Industri.....	47
3.2 Populasi dan Sampel	47
3.3 Jenis dan Sumber Data	48
3.4 Metode Analisis.....	48
3.4.1 Statistik Deskriptif	48
3.4.2 Uji Asumsi Klasik	49
3.4.2.1 Uji Normalitas	49
3.4.2.2 Uji Multikolonieritas	50
3.4.2.3 Uji Heteroskedasitas	51
3.4.2.4 Uji Autokorelasi.....	52
3.4.3 Analisis Regresi Berganda	53
3.4.4 Uji Hipotesis	54
3.4.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	54
3.4.4.2 Uji Signifikansi Simultan (F test).....	55

3.4.4.3 Uji Signifikansi Parsial (t test)	56
---	----

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Data Penelitian.....	56
4.2 Analisis Data	57
4.2.1 Statistik Deskriptif.....	57
4.2.2 Uji Asumsi Klasik	60
4.2.2.1 Uji Normalitas	61
4.2.2.2 Uji Multikolonieritas	63
4.2.2.3 Uji Heteroskedasitas	64
4.2.2.4 Uji Autokorelasi.....	66
4.2.3 Hasil Uji Hipotesis.....	67
4.2.3.1 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²)	67
4.2.3.2 Hasil Uji Signifikansi Simultan (F test).....	68
4.2.3.3 Hasil Uji Signifikansi Parsial (t test)	69
4.2.4 Pengujian Hipotesis	70
4.2.4.1 Pengujian Hipotesis Pertama (H1).....	71
4.2.4.2 Pengujian Hipotesis Kedua (H2)	71
4.2.4.3 Pengujian Hipotesis Ketiga (H3)	72
4.2.4.4 Pengujian Hipotesis Keempat (H4)	72
4.2.4.5 Pengujian Hipotesis Kelima (H5).....	72
4.2.4.6 Pengujian Hipotesis Keenam (H ₆)	72
4.2.5 Interpretasi Hasil.....	73
4.2.5.1 Pengaruh Jumlah Dewan Komisaris terhadap Kinerja Lingkungan	74
4.2.5.2 Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Kinerja Lingkungan	75
4.2.5.3 Pengaruh Aktivitas Komite Audit terhadap Kinerja Lingkungan .	76
4.2.5.4 Pengaruh Profitabilitas terhadap Kinerja Lingkungan	77
4.2.5.5 Pengaruh Leverage terhadap Kinerja Lingkungan	77
4.2.5.6 Pengaruh Jenis Industri terhadap Kinerja Lingkungan	77

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	79
5.2 Implikasi	81
5.3 Keterbatasan	82
5.4 Saran	83

DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	88

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kriteria PROPER.....	19
Tabel 2.2	Ringkasan Penelitian Terdahulu	33
Tabel 4.1	Perolehan Sampel Penelitian	56
Tabel 4.2	Statistik Deskriptif.....	57
Tabel 4.3	Distribusi Frekuensi Ukuran Dewan Komisaris	57
Tabel 4.4	Distribusi Frekuensi Proporsi Komisaris Independen	58
Tabel 4.5	Distribusi Frekuensi Aktivitas Komite Audit	59
Tabel 4.6	Distribusi Frekuensi Jenis Industri	59
Tabel 4.7	Distribusi Frekuensi Kinerja Lingkungan Sampel	60
Tabel 4.8	One Sample Kolmogorov Smirnov Test	62
Tabel 4.9	Hasil Uji Multikolonieritas.....	63
Tabel 4.10	Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser.....	65
Tabel 4.11	Tabel Durbin Watson.....	66
Tabel 4.12	Tabel Run Test.....	67
Tabel 4.13	Tabel Uji Koefisien Determinasi (R^2)	68
Tabel 4.14	Tabel Uji Simultan F test.....	69
Tabel 4.15	Tabel Uji Regresi Parsial (T test).....	69
Tabel 4.16	Tabel Ringkasan Hipotesis	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Dewan Komisaris dalam One Tier System	28
Gambar 2.2	Struktur Dewan komisaris dan Dewan Direksi dalam <i>Two Tier System</i> yang Diadopsi oleh Indonesia	29
Gambar 2.3	Kerangka Pemikiran Teoritis	37
Gambar 4.1	Grafik Histogram Normalitas	61
Gambar 4.2	Grafik Normal Plot Normalitas	61
Gambar 4.3	Grafik Scatterplot Heteroskedastisitas	64
Gambar 4.4	Grafik Scatterplot Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser	65

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Perusahaan Sampel.....	90
Lampiran 2	Data Sampel Penelitian.....	91
Lampiran 3	Hasil Ouput SPSS.....	93

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanggung jawab perusahaan merupakan konsep perusahaan yang memiliki tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang, dan komunitas. Ada banyak pandangan mengenai tanggung jawab perusahaan. Salah satunya, pandangan klasik oleh Friedman yang dikutip dalam Robbins dan Coulter (2005) bahwa tanggung jawab sosial manajemen adalah memaksimalkan laba. Hal ini dikarenakan tanggung jawab utama manajer adalah menjalankan bisnis sesuai dengan kepentingan terbesar pemegang saham.

Selain itu, pandangan sosial ekonomi menyatakan tanggung jawab perusahaan tidak hanya memaksimalkan laba tetapi juga untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan sosial stakeholder. Ullman (1985) menyatakan ada dua perspektif dalam melakukan kegiatan sosial perusahaan. Pertama, membangun image diantara stakeholder, menyokong keuntungan dan kepercayaan dari beragam kelompok stakeholder. Kedua, kegiatan sosial membawa dampak positif terhadap reputasi perusahaan dan memberikan manfaat ekonomi dari perspektif strategis.

Elkington (1997) merumuskan tiga faktor utama (*triple bottom line*) operasi perusahaan dalam kaitannya dengan lingkungan dan manusia yaitu faktor manusia dan masyarakat (*people*), nilai ekonomi dan keuntungan (*profit*) serta faktor

lingkungan (*planet*). Ketiga faktor ini bergantung satu sama lain dan bertujuan untuk menciptakan keberlanjutan perusahaan. Dengan adanya *tipple bottom line* maka tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya dihadapkan pada *single bottom* yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dari kondisi keuangan tetapi juga melalui masalah sosial dan lingkungan (Daniri, 2008).

Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 Pasal 1 menyatakan

“..bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.”

Keseluruhan tanggung jawab tersebut dipandang sebagai kontribusi perusahaan dan dunia bisnis secara umum dalam mewujudkan *sustainability development*. Hal ini, seiring dengan berkembangnya kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas perusahaan, misalnya polusi udara, tanah, air dan limbah industri. Akuntansi lingkungan berfokus pada masalah sosial dan lingkungan perusahaan yang menyediakan informasi lingkungan untuk mengukur kinerja lingkungan. pengukuran kinerja ini berdasarkan aktivitas-aktivitas konservasi lingkungan yang dilakukan perusahaan dalam seluruh proses bisnis dengan mengidentifikasi item-item lingkungan (Lindrianasari, 2008).

Implementasi akuntansi lingkungan dalam sebuah perusahaan dapat dilihat dari *corporate sosial responsibility* dan *sustainability report*. Dalam perspektif teori legitimasi, organisasi akan berusaha membenarkan dan menyakinkan masyarakat bahwa apa yang dilakukan oleh perusahaan telah sesuai dengan norma dan kontrak

sosial (Deegan, 2002). Perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik akan mengungkapkan kuantitas informasi dan mutu lingkungan yang lebih baik dibandingkan perusahaan dengan kinerja lingkungan yang lebih buruk (Rakhiemah dan Agustia, 2009).

Kinerja lingkungan merupakan aspek penting untuk diperhatikan karena perusahaan dituntut tidak hanya berfokus pada keuntungan tetapi juga memperhatikan kerusakan yang ditimbulkan terhadap lingkungan demi tercapainya tujuan perusahaan. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pasal 74 mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menyatakan:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Lindrianasari (2008) menyatakan ada beberapa indikator kinerja lingkungan yang dapat digunakan yaitu AMDAL, ISO 14001 dan PROPER. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang AMDAL menyatakan analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) merupakan kajian mengenai dampak besar suatu usaha dan kegiatan lingkungan hidup yang diperlukan untuk proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan. ISO 14001

merupakan sistem manajemen lingkungan yang dilakukan oleh badan yang memiliki standar internasional. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) membentuk Program Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) untuk memeringkat kinerja lingkungan perusahaan.

Dalam Laporan Hasil Penilaian PROPER tahun 2011 dijelaskan tujuan dibentuknya adalah mendorong ketaatan perusahaan terhadap peraturan lingkungan lingkungan hidup melalui program pengembangan masyarakat. Penilaian kinerja berdasarkan PROPER menggunakan warna yaitu emas, hijau, biru, merah dan hitam yang digunakan untuk menilai kualitas kinerja lingkungan sebuah perusahaan yang mencakup seluruh propinsi di Indonesia.

Selain PROPER, bentuk kepedulian pemerintah terhadap lingkungan hidup terwujud dengan adanya Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 dan Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 menyampaikan laporan tahunan didalamnya harus memuat laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Laporan ini akan disusun berdasarkan kinerja sosial dan lingkungan yang telah dilakukan perusahaan.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan berfokus pada pengungkapan kinerja lingkungan perusahaan. Al-Tuwaijri *et al.* (2006), Hughes *et al.* (2000), dan Wiseman (1982) menemukan terdapat hubungan positif signifikan antara kinerja lingkungan, kinerja ekonomi, dan kinerja lingkungan dengan pengungkapan lingkungan. Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan akan melakukan sesuai

dengan keinginan masyarakat dengan mengungkapkan informasi lingkungan untuk membenarkan perusahaan di mata publik dan mengurangi tekanan dari masyarakat. Namun, informasi yang diungkapkan tidak sesuai dengan kinerja lingkungan perusahaan yang sesungguhnya (Cong dan Freedman, 2011). Selain itu, perusahaan yang memiliki kinerja ekonomi yang baik cenderung untuk tidak melaporkan kinerja lingkungannya (Donovan dan Gibson dalam Sembiring, 2002).

Perusahaan yang memiliki sensitifitas terhadap lingkungan memiliki dorongan untuk melakukan pengungkapan yang lebih akan kinerja lingkungan mereka (Pattern dan Cho, 2007). Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa rata-rata perusahaan yang melakukan kinerja lingkungan yang buruk akan melakukan pengungkapan yang lebih informatif untuk menutupi kinerja lingkungan yang buruk.

Lindrianasari (2007) juga menemukan ada hubungan positif antara kinerja lingkungan dan kualitas pengungkapan lingkungan. Rakiemah dan Agustia (2006) menemukan bahwa perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Ketika perusahaan melakukan kinerja lingkungan yang baik maka menimbulkan adanya pernyataan positif dan pengungkapan mengenai kinerja lingkungan perusahaan yang menggambarkan legitimasi (Gray et al., 1995 dalam Hughes et al., 2001).

Kinerja lingkungan juga dipengaruhi oleh kinerja keuangan, hal ini terlihat dalam penelitian Suratno dkk (2007) yang menemukan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh terhadap kinerja ekonomi. Dunn dan Sainty (2009) juga menemukan adanya hubungan positif antara kinerja sosial perusahaan dengan kinerja keuangan

dan hutang. Menurut Pfeiger *et al* (dikutip oleh Jafar dan Arifah, 2006) pelestarian lingkungan oleh perusahaan akan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan karena ketertarikan pemegang saham maupun *stakeholder* memberikan dukungan pada perusahaan yang melakukan pengelolaan lingkungan secara bertanggung jawab.

Selain kinerja lingkungan, pengungkapan kinerja lingkungan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kinerja keuangan dan jenis industri. Sembiring (2005) menyatakan bahwa profitabilitas dan leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Rawi dan Muchlish (2010) menemukan bahwa leverage tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap CSR. Menurut Pahuja (2009) perusahaan memiliki margin tinggi akan lebih “percaya diri” dalam mengungkapkan informasi sosial dan aktivitas lingkungannya dibandingkan perusahaan dengan profitabilitas rendah.

Hasibuan (2001) menemukan profil perusahaan dan jenis industri *high profile* dan *low profile* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan tahunan emiten. Sembiring (2003) menemukan bahwa jenis perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Tanggung jawab lingkungan merupakan konsekuensi dari tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) karena perusahaan berkewajiban memperhatikan kepentingan *stakeholder* agar tercipta kerja sama yang aktif dan untuk sustainability perusahaan. Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) menyatakan salah satu tujuan dibentuknya *good corporate governance* adalah

mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.

Undang-Undang No.40 Tahun 2007 mewajibkan adanya tata kelola perusahaan yang baik dalam menjalankan perseroan termasuk tanggung jawab lingkungan. Perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap lingkungan diharapkan menjadi pelopor penerapan *good corporate governance*. Dewan komisaris merupakan salah satu organ *good corporate governance* dalam melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dan memastikan pelaksanaan *good corporate governance*.

Dalam melaksanakan *good corporate governance* secara efektif organ perusahaan menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan secara independen. Oleh sebab itu, dewan komisaris independen merupakan pihak yang tidak mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang kendali, direksi, komisaris dan perusahaan itu sendiri (KNKG, 2006).

Sembiring (2005), Nurkhin (2009), Dunn dan Sainty (2009), dan Villiers *et al.* (2009) menemukan pengungkapan tanggung jawab sosial dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu independensi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, jumlah pertemuan komite audit. Chaganti *et al.* (1985) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris yang lebih kecil lebih mudah diatur dan berperan lebih baik dalam pengendalian. Dewan komisaris pemegang peranan penting dalam melaksanakan strategi perusahaan dan mengawasi dewan direksi dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab terhadap pemegang saham.

Komisaris independen dianggap sebagai sebuah mekanisme yang dapat diandalkan yang mampu mengaburkan konflik agensi antara manajer dan pemegang saham (Fama dan Jensen, 1983). Keberadaan komisaris independen memberikan *check* dan *balance* yang dibutuhkan dalam meningkatkan efektivitas dewan direksi. Perusahaan yang memiliki dewan independen cenderung lebih peka terhadap kinerja sosial dan mencengah tindakan yang menimbulkan pelanggaran lingkungan (Dunn dan Sainty, 2009). Baroko (2008) menemukan proporsi dewan komisaris independen hubungan positif dengan pengungkapan tanggung jawab sosial. Villiers *et al.* (2009) menemukan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap *board size* dan dewan independen. Dewan komisaris dianggap efektif dalam mengawasi manajemen perusahaan termasuk dalam melakukan tanggung jawab sosial perusahaan.

Sebelumnya banyak penelitian mengenai kinerja lingkungan yang berfokus pada pengungkapannya. Oleh sebab itu, penelitian ini dirancang berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana penelitian ini berfokus pada kinerja lingkungan yang dinilai dari peringkat PROPER. Kinerja lingkungan akan dihubungkan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja lingkungan.

Adapun faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan penelitian terdahulu adalah karakteristik perusahaan yaitu profitabilitas, leverage serta jenis industri, mengingat kebanyakan jenis industri berhubungan langsung dan berdampak terhadap lingkungan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh mekanisme corporate governance terhadap kinerja lingkungan. Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa salah satu tujuan penerapan

good corporate governance mendorong pelaksanaan tanggung jawab sosial dan kinerja lingkungan. Adapun mekanisme corporate governance seperti ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen dan aktivitas komite audit.

Berdasarkan latar belakang diatas maka fokus dari penelitian ini adalah menguji dan menganalisis pengaruh mekanisme corporate governance dan karakteristik perusahaan terhadap kinerja lingkungan. Penelitian ini menggunakan perusahaan yang terdaftar dalam Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2010 dan 2011.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sembiring (2003), Rawi dan Muchlish (2010), Pahuja (2009) ditemukan bahwa profitabilitas berpengaruh pada pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Ratnasari (2011) menemukan bahwa ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Penelitian terdahulu kebanyakan membahas pengungkapan kinerja lingkungan. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan berbeda dengan sebelumnya. Penelitian ini lebih berfokus pada kinerja lingkungan yang tercermin dalam peringkat PROPER dihubungkan dengan karakteristik perusahaan dan mekanisme *corporate*

governance. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini dimaksud untuk menjawab pertanyaan dibawah ini :

1. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja lingkungan perusahaan?
2. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja lingkungan perusahaan?
3. Apakah aktivitas komite audit berpengaruh terhadap kinerja lingkungan perusahaan?
4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap kinerja lingkungan perusahaan?
5. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap kinerja lingkungan perusahaan?
6. Apakah jenis industri berpengaruh terhadap kinerja lingkungan perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah

1. Menganalisis dan memberikan bukti empiris pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja lingkungan perusahaan.
2. Menganalisis dan memberikan bukti empiris pengaruh proporsi komisaris independen terhadap kinerja lingkungan perusahaan.
3. Menganalisis dan memberikan bukti empiris pengaruh aktivitas komite audit terhadap kinerja lingkungan perusahaan
4. Menganalisis dan memberikan bukti empiris pengaruh profitabilitas terhadap kinerja lingkungan perusahaan.

5. Menganalisis dan memberikan bukti empiris pengaruh terhadap leverage kinerja lingkungan perusahaan.
6. Menganalisis dan memberikan bukti empiris pengaruh jenis industri perusahaan terhadap kinerja lingkungan perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Dari aspek teoritis, penelitian ini dapat menambah wawasan dibidang akuntansi khususnya mengenai kinerja lingkungan, *good corporate governance* dan karakteristik perusahaan dan diharapkan akan ada penelitian mengenai kinerja lingkungan yang lebih kompleks.
2. Dari aspek praktis, penelitian ini dapat berguna bagi pemakai laporan keuangan, yaitu :
 - a. Sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi pada sebuah perusahaan dan memilih perusahaan yang memperhatikan tanggung jawab perusahaan dalam kelestarian lingkungan.
 - b. Manajemen perusahaan semakin menyadari pentingnya pelestarian lingkungan sehingga menerapkan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dalam pelaksanaan *good corporate governance*.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- BAB I Berisi pendahuluan yang berupa uraian latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.
- BAB II Berisi tinjauan pustaka yang menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini dan beberapa penelitian terdahulu. Bab ini juga menjelaskan kerangka pemikiran yang melandasi hipotesis penelitian dan hubungan antar variabel penelitian.
- BAB III Berisi metode penelitian yang menguraikan tentang variabel penelitian dan definisi operasionalnya, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis yang digunakan.
- BAB IV Berisi tentang hasil dan pembahasan. Dalam bab ini diuraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data dan pembahasan yang didasarkan atas hasil analisis data.
- BAB V Berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh dari pembahasan sebelumnya. Dalam bab ini juga disebutkan tentang keterbatasan penelitian dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Teori Legitimasi

Teori legitimasi menjelaskan kontrak sosial organisasi dengan masyarakat, kelangsungan hidup perusahaan akan terancam jika masyarakat merasa organisasi telah melanggar kontrak sosialnya. Dimana jika masyarakat merasa tidak puas dengan operasi organisasi secara sah (*legitimate*) maka masyarakat dapat mencabut kontrak sosial dalam operasi organisasi (Deegan, 2002). Dowling dan Pfeffer (dikutip dari Ghozali dan Chariri, 2007) menyatakan teori legitimasi sangat bermanfaat dalam menganalisis perilaku organisasi. Mereka mengatakan :

Karena legitimasi adalah hal yang penting bagi organisasi, batasan-batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan.

Teori legitimasi dilandasi oleh kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Legitimasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diinginkan dan dicari perusahaan dari masyarakat (Ghozali dan Chariri, 2007). Shocker dan Sethi (1974) dikutip dalam Ghozali dan Chariri (2007) memberikan penjelasan mengenai kontak sosial sebagai berikut :

Semua institusi sosial tidak terkecuali perusahaan beroperasi di masyarakat melalui kontrak sosial, baik eksplisit maupun implisit dimana kelangsungan hidup pertumbuhan didasarkan pada :

1. Hasil akhir (output) yang secara sosial dapat diberikan kepada masyarakat luas
2. Distribusi manfaat ekonomi, sosial atau politik kepada kelompok sesuai dengan power yang dimiliki.

Teori legitimasi menjelaskan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial dilakukan perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat dimana perusahaan berada. Legitimasi ini mengamankan perusahaan dari hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat meningkatkan nilai perusahaan tersebut. Teori legitimasi menyatakan organisasi bukan hanya memperhatikan hak-hak investor tetapi juga memperhatikan hak publik (Deegan dan Rankin, 1996).

Legitimasi diterima dengan menunjukkan kinerja perusahaan yang sesuai dengan nilai sosial. Aktivitas perusahaan dapat dinilai melalui dua dimensi yaitu aktivitas (kinerja) perusahaan yang sesuai dengan nilai sosial dan pengungkapan apa yang telah dilakukan perusahaan yang sesuai dengan nilai sosial (Buhr, 1997). Teori legitimasi menyatakan kinerja lingkungan yang lemah meningkatkan ancaman legitimasi sosial perusahaan sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan dalam laporan tahunan (Pattern, 2002).

Teori legitimasi menyatakan perusahaan akan memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan norma yang ada dalam masyarakat dan lingkungan, diterima oleh pihak luar sebagai suatu yang sah (Deegan, 2002). Di saat ada perbedaan antara nilai yang dianut perusahaan dengan nilai-nilai masyarakat maka legitimasi perusahaan berada dalam posisi terancam. Perbedaan antara nilai perusahaan dan nilai masyarakat dinamakan "*legitimacy gap*" (Dowling dan Pfeffer dikutip oleh Ghazali dan Chariri, 2007).

2.1.2 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak dimana satu atau lebih pihak (prinsipal) melibatkan pihak lain (agen) untuk melakukan beberapa layanan atas nama prinsipal. Prinsipal yang dimaksud adalah pemegang saham (investor) sedangkan yang dimaksud dengan agen adalah manajemen perusahaan.

Dengan adanya hubungan kontrak kedua belah pihak maka terjadinya manipulasi untuk meningkatkan utilitas masing-masing sangat mungkin terjadi (Jensen dan Meckling, 1976). Agen berkewajiban memaksimalkan kesejahteraan para pemegang saham (prinsipal) tetapi di sisi lain manajer juga bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraannya. Hal ini yang akan memicu terjadi konflik kepentingan antara agen dan prinsipal.

Salah satu cara yang digunakan untuk memonitor masalah kontrak dan mengurangi oppurtunistik manajer adalah dengan menggunakan tata kelola perusahaan (*corporate governance*). Nasution dan Setiawan (2007) menyatakan *corporate governance* merupakan salah satu konsep yang digunakan untuk memonitor kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan mendasarkan kerangka peraturan. Perusahaan yang melaksanakan *good corporate governance* sudah seharusnya melaksanakan aktivitas CSR sebagai wujud kepedulian perusahaan pada lingkungan sosial (Rustiarini, 2010).

Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia menyatakan salah satu tujuan pelaksanaan *corporate governance* adalah mendorong timbulnya

kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang. Tanggung jawab sosial mengharuskan perusahaan bertanggung jawab kepada multilevel *stakeholder* untuk melaporkan keberlanjutan perusahaan secara sukarela (Sun *et al.* 2009).

Pengungkapan kinerja lingkungan sebagai salah satu tanggung jawab sosial perusahaan merupakan cara untuk mengalihkan perhatian pemegang saham dari isu lainnya. Aspek *corporate governance* seperti proporsi komisaris independen, jumlah dewan komisaris, jumlah anggota komite audit dan jumlah pertemuannya merupakan mekanisme pengendali yang tepat untuk mengurangi konflik keagenan (Hasibuan, 2001).

2.2 Kinerja Lingkungan

Kinerja lingkungan adalah kinerja perusahaan untuk menciptakan lingkungan yang hijau (*green*) (Suratno dkk, 2007). Kinerja lingkungan merupakan salah satu langkah penting perusahaan dalam meraih kesuksesan bisnis. Kinerja lingkungan adalah hasil yang dapat diukur melalui sistem manajemen lingkungan yang didasarkan pada kebijakan lingkungan, sasaran lingkungan dan target lingkungan (Purwanto, 2004). Sistem manajemen lingkungan memiliki standar yang mendeskripsikan sebuah sistem yang membantu perusahaan untuk mencapai kinerja lingkungan yang lebih baik (Sturm, 1997). Jenis indikator kinerja lingkungan dibagi menjadi dua yaitu:

1. Indikator *lagging* yaitu ukuran kinerja *end process*, mengukur output hasil proses seperti jumlah limbah yang dikeluarkan.
2. Indikator *leading* yaitu ukuran kinerja *in process*, mengukur faktor apa yang diharapkan membawa perubahan bagi kinerja lingkungan.

Terdapat dua jenis kinerja lingkungan yaitu kinerja lingkungan kuantitatif dan kinerja lingkungan kualitatif.

- a. Kinerja lingkungan kuantitatif adalah kinerja yang hasilnya dapat diukur dari sistem manajemen lingkungan yang terkait kontrol aspek lingkungan fisiknya. Indikator kualitatif adalah ukuran yang didasarkan pada semantik, pandangan, persepsi seseorang berdasarkan pengamatan dan penilaiannya terhadap sesuatu. Kuantitatif adalah ukuran yang didasarkan pada data empiris dan hasilnya numerik yang menunjukkan karakteristik kinerja dalam bentuk fisik, keuangan dan bentuk lain, misalnya batas baku mutu limbah.
- b. Kinerja lingkungan kualitatif adalah kinerja yang hasilnya dapat diukur dari hal-hal yang terkait dengan ukuran aset non fisikm seperti prosedur, proses inovasi, motivasi, dan semangat kerja yang dialami pelaku kegiatan dalam mewujudkan kebijakan lingkungan organisasi, sasaran dan target.

2.3 Penilaian Kinerja Lingkungan Menggunakan PROPER

PROPER adalah Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diadakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Program ini merupakan salah satu program unggulan Kementerian

Lingkungan Hidup dan pemberian insenti dan atau disinsentif kepada penanggung jawab usaha dan kegiatan. Tujuan diadakannya program ini agar perusahaan terdorong untuk mentaati peraturan lingkungan hidup dan mencapai keunggulan lingkungan (*enviromental excellency*) melalui prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam proses produksi.

PROPER dimulai sejak tahun 1996, terhenti pada tahun 1997-2001 karena krisis ekonomi. Pada tahun 2002 dihidupkan kembali dengan kriteria yang lebih lengkap. Tahun 2010-2014 penekanan diberikan pada dua hal yaitu ekstensifikasi PROPER, mendorong upaya sukarela perusahaan untuk menginternalisasi konsep-konseo lingkungan dalam kegiatan produksi.

Peserta PROPER mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini dapat dilihat pada tahun 2002 peserta PROPER sebanyak 85 perusahaan. Pada tahun 2003 sebanyak 466 dan hingga tahun 2011 sebanyak 995 perusahaan yang tergabung dalam PROPER. Tingkat ketaatan perusahaan terhadap peraturan pengelolaan lingkungan hidup mencapai 66% pada periode 2010-2011. Tingkat ketaatan ini diperoleh dari perbandingan perusahaan yang memperoleh perusahaan dengan peringkat emas, biru, hijau dengan total perusahaan yang tergabung dalam PROPER.

Kriteria penilaian PROPER tertuang pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 5 tahun 2011 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Secara umum peringkat kinerja PROPER dibedakan menjadi 5 warna yaitu:

Tabel 2.1
Kriteria PROPER

No	Peringkat	Keterangan
1.	Emas	Diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan (<i>environmental excellency</i>) dalam proses produksi dan/atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat
2.	Hijau	Diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (<i>beyond compliance</i>) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumberdaya secara efisien melalui upaya 4R (<i>reduce, reuse, recycle dan recovery</i>) dan melakukan upaya tanggung jawab sosial (<i>comdev</i>) dengan baik
3.	Biru	Diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan
4.	Merah	Diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang upaya pengelolaan lingkungan hidup dilakukannya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
5.	Hitam	Diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau tidak melaksanakan sanksi administrasi

Sumber: Laporan PROPER 2011

2.4 Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)

2.4.1 Definisi Corporate Governance

Tujuan dari corporate governance adalah menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Corporate governance digunakan untuk menjelaskan peranan dan perilaku dari dewan direksi, dewan

komisaris dan para pemegang saham. Corporate governance memiliki tiga komite yaitu Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi.

Definisi tentang corporate governance menurut Cadbury Committee dalam Forum Corporate Governance Indonesia adalah:

“seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.”

Corporate governance merupakan konsep yang didasari pada teori keagenan, yang memberikan keyakinan pada investor bahwa agen akan bekerja untuk kepentingan mereka (Restuningdiah, 2007). Rezaee (2007) mendefinisikan corporate governance sebagai berikut:

“...is a process effected by legal, regulatory, contractual, and market based mechanism and best practices to create substantial shareholders value while protecting the interest of other shareholders.”

Selain itu, Solomon (2007) mendefinisikan corporate governance sebagai berikut:

“...the system of check and balance, both internal and external to companies which ensures that companies discharge their accountability to all their stakeholders and act in a socially responsible way in all areas of their bussiness activity”.

Tata kelola perusahaan yang baik menurut Menteri Keuangan adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ perusahaan untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai perusahaan bagi seluruh stakeholder. Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik diperlukan untuk memenuhi kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi industri untuk berkembang dengan baik dan sehat yang bertujuan mewujudkan *stakeholder value* (Restuningdiah, 2007). Gagasan utama

tata kelola perusahaan yang baik adalah mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan yang peduli terhadap sosial dan lingkungan.

2.4.2 Asas Corporate Governance

Asas *Good Corporate Governance* (GCG) diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha dengan memperhatikan *stakeholder* yaitu (KNKG, 2006):

a. *Transparansi (Transparency)*

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, maka perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara mudah diakses dan dipahami oleh *stakeholder*

b. *Akuntabilitas (Accountability)*

Perusahaan harus mempertanggungjawabkan kinerjanya sehingga perusahaan harus dikelola dengan benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan *stakeholder*. Akuntabilitas merupakan persyaratan yang harus dilakukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

c. *Responsibilitas (Responsibility)*

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan yang memadai.

d. *Independensi (Independency)*

Dalam melaksanakan asas good corporate governance, perusahaan harus dikelola dengan independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan diintervensi oleh pihak lain.

e. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan kewajaran dan kesetaraan.

2.4.3 Mekanisme Corporate Governance

Terdapat lima partisipan corporate governance yaitu dewan direksi, *chief executive officer* (CEO), dewan komisaris, auditor, dan stakeholder. Dewan direksi merupakan organ yang bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan dengan mencapai tujuan perusahaan. Tugas utama CEO adalah menjalankan perusahaan dengan sebaik mungkin untuk mengamankan aset perusahaan.

Menurut Lins dan Warnock (2004) dalam Fama (2007) secara umum mekanisme yang dapat mengendalikan perilaku manajemen atau sering disebut mekanisme corporate governance dapat diklasifikasikan kedalam dua kelompok, yaitu mekanisme internal dan eksternal. Mekanisme internal adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti rapat umum pemegang saham (RUPS), komposisi dewan direksi, komposisi dewan komisaris dan pertemuan dengan *board of director*. Mekanisme eksternal adalah cara mempengaruhi perusahaan selain dengan menggunakan mekanisme internal, seperti pengendalian oleh perusahaan dan pengendalian pasar.

2.4.3.1 Dewan Komisaris

Menurut UU Perseroan Terbatas Pasal 97 menyatakan bahwa Komisaris bertugas untuk mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberi nasihat terhadap direksi. Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan perseroan. Egon Zehnder International (2000) dalam Pedoman Good Corporate Governance Indonesia (FGCI) ¹ menyatakan dewan komisaris merupakan inti dari corporate governance yang ditugaskan menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Dewan komisaris bertanggung jawab untuk meningkatkan daya saing atau efisiensi sehingga sebagai pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan.

Anggota dewan komisaris sebuah perusahaan diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dari orang-orang yang patut dan layak bagi perusahaan. Mereka diangkat untuk periode tertentu dan apabila memungkinkan mereka bisa diangkat kembali. Dewan komisaris tidak boleh ikut serta dalam mengambil keputusan operasional dan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada RUPS (KNKG, 2006). Dewan komisaris bertanggung jawab untuk menentukan apakah manajemen telah memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian intern (Mulyadi, 2002).

¹ Forum For Corporate Governance (FCGI) didirikan oleh lima asosiasi bisnis dan profesi yaitu AEI, IAI-KAM, INA, dan MTI. FCGI memainkan peranan dan usahanya yang signifikan mensosialisasikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. FCGI menerbitkan tata kelola perusahaan yang berjudul ' Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan).

Peranan dewan komisaris dalam prakteknya tergantung pada lingkungan yang diciptakan oleh perusahaan yang bersangkutan. Namun, dewan komisaris seringkali dianggap tidak memiliki manfaat. Hal ini terlihat, banyak anggota dewan komisaris yang tidak memiliki kemampuan untuk menunjukkan independensinya.

Selain itu, dewan komisaris dianggap gagal dalam mewakili kepentingan stakeholder lainnya selain kepentingan pemegang saham mayoritas. Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 pasal 92 menyatakan dewan komisaris terdiri atas 1 (satu) orang atau lebih dan bagi perseroan terbatas yang menghimpun dana dari masyarakat wajib mempunyai paling sedikit dua orang anggota dewan komisaris. Menurut Beasley (2001) dalam Sembiring (2003) ada tiga karakteristik dewan komisaris dalam melakukan pengawasan manajemen yaitu komposisi dewan komisaris, pemisahan antara pimpinan dewan komisaris dengan CEO dan ukuran dewan komisaris.

2.4.3.2 Komisaris Independen

Dewan komisaris dapat berasal dari pihak terafiliasi yang dikenal sebagai komisaris independen dan komisaris yang terafiliasi. Komisaris independen bukan anggota manajemen dan pemegang saham, serta tidak terkait dengan aktivitas operasional perusahaan. Komisaris independen juga harus memiliki latar belakang akuntansi atau keuangan.

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG², 2006) menyatakan komposisi atau jumlah komisaris independen tidak ditentukan dalam jumlah tertentu. Namun, jumlahnya harus dapat menjamin mekanisme pengawasan berjalan efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut peraturan Bursa Efek Jakarta, perusahaan yang terdaftar di bursa harus mempunyai komisaris independen yang secara proporsional sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham yang minoritas. Dalam peraturan ini, persyaratan jumlah minimal komisaris independen adalah 30% dari seluruh anggota dewan komisaris (FCGI, 2002). Proporsi komisaris independen menggambarkan independensi anggota komisaris dinyatakan dalam perbandingan jumlah anggota dewan komisaris independen dengan keseluruhan anggota dewan komisaris.

2.4.3.3 Aktivitas Komite Audit

Dalam menjalankan tugas dewan komisaris dibantu oleh beberapa komite. Komite yang umumnya dibentuk adalah komite kompensasi, nominasi dan audit. Praktek yang berlaku di dunia internasional disarankan bahwa anggota komite-komite tersebut diisi oleh anggota komisaris independen. KNKG (2006) menyatakan:

² Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKG) dibentuk pada awalnya pada tahun 1999 dengan nama Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menko Ekuin Nomor: KEP/31/M.EKUIIN/08/1999 mengeluarkan Pedoman Good Corporate Governance (GCG) yang pertama dan disempurnakan hingga tahun 2006.

“perusahaan yang tercatat dibursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk dan jasanya digunakan oleh masyarakat, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, sekurang-kurangnya harus membentuk Komite Audit.”

Menurut keputusan Badan Pengelola dan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No.29/PM/2004 perusahaan publik wajib memiliki komite audit dan pedoman kerja komite audit. Komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris, yang sekurang-kurangnya dua anggota lainnya berasal dari luar emiten atau perusahaan publik. Komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris yang dilaporkan melalui RUPS.

Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh dewan direksi kepada dewan komisaris. Komite audit diketuai oleh komisaris independen dan anggotanya dapat terdiri dari komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dewan komisaris. Pada umumnya, komite audit mempunyai tanggung jawab pada tiga bidang, yaitu laporan keuangan, tata kelola perusahaan dan pengawasan perusahaan (FCGI, 2002).

i. Laporan Keuangan (*Financial Reporting*)

Komite audit memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen telah memberikan gambaran kondisi keuangan, hasil usaha dan rencana serta komitmen jangka panjang perusahaan yang sebenarnya.

ii. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Komite audit bertanggung jawab memastikan perusahaan telah menjalankan perusahaan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan

iii. Pengawasan Perusahaan (*Corporate Control*)

Komite audit mengawasi permasalahan maupun hal-hal yang berpotensi mengandung resiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan auditor internal.

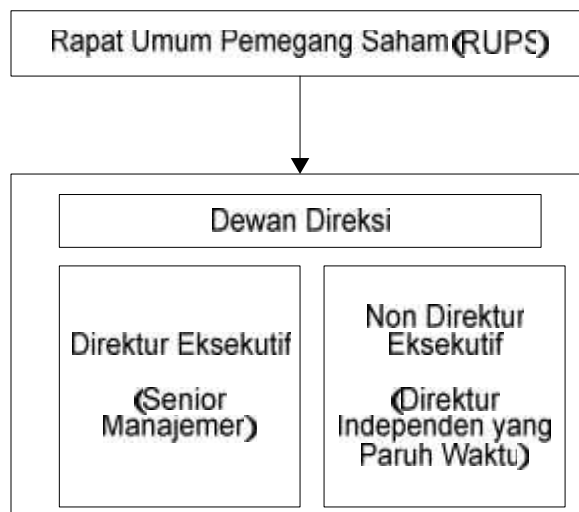
Komite audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan atau sama dengan ketentuan minimal rapat dewan komisaris yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Setiap rapat komite audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite audit yang hadir. Pengawasan internal perusahaan dilakukan oleh direksi, komisaris dan komite audit yang memiliki hubungan fungsional.

2.4.4 Sistem One Tier dan Two Tier

Forum Corporate Governance in Indonesia (FCGI, 2001) menyatakan bahwa terdapat dua sistem hukum yang berbeda terkait dengan bentuk dewan dalam perusahaan yaitu Anglo Saxon menganut satu tingkat (*one tier system*) dan Kotinental Eropa menganut sistem dua tingkat (*two tiers system*). Sistem hukum Anglo Saxon mempunyai perusahaan hanya mempunyai satu dewan direksi yang

merupakan gabungan antara manajer atau pengurus senior dan direktur independen yang bekerja dengan prinsip paruh waktu.

Gambar 2.1
Struktur Dewan Direksi dalam *One Tier System*



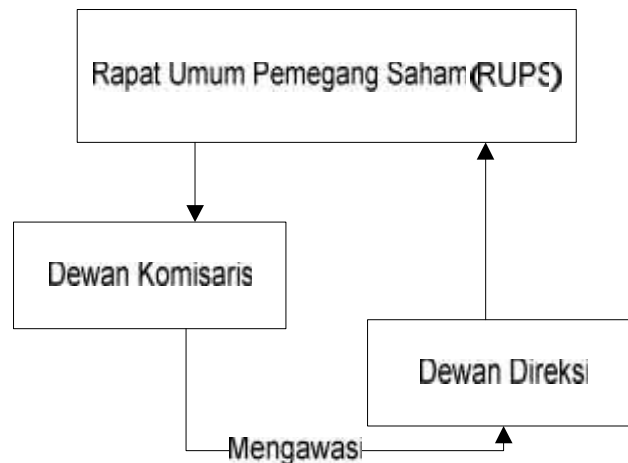
Sumber: Forum Corporate Governance Indonesia, 2001

Negara yang menganut sistem satu tingkat adalah Amerika Serikat dan Inggris. Sistem Hukum Kontinental Eropa mempunyai dua badan terpisah yaitu dewan pengawas (dewan komisaris) dan dewan manajemen (dewan direksi). Anggota dewan komisaris diangkat dan diganti dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dewan komisaris tidak boleh terlibat dalam tugas manajemen dan bertugas untuk mengawasi tugas-tugas manajemen. Dewan direksi bertugas untuk mengelola dan mewakili perusahaan dengan berada dibawah pengawasan dewan komisaris. Dewan direksi juga bertanggungjawab terhadap dewan komisaris dan wajib memberikan informasi terhadap dewan komisaris.

Negara yang menganut sistem dua tingkat adalah Denmark, Jepang, dan Belanda. Sistem Indonesia berasal dari sistem hukum Belanda sehingga menganut

sistem dua tingkat dalam struktur dewan perusahaan. Dewan komisaris diberi kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan dewan direksi.

Gambar 2.2
Struktur Dewan komisaris dan Dewan Direksi dalam *Two Tier System* yang Diadopsi oleh Indonesia



Sumber: Forum Corporate Governance Indonesia, 2001

2.4.5 Karakteristik Perusahaan

Setiap perusahaan memiliki karakteristik yang berbeda. Lang dan Lundholm (1993) dan Wallance (1994) dalam Hasibuan (2001) membagi karakteristik perusahaan menjadi tiga variabel yaitu variabel-variabel struktur (*structure related*), variabel-variabel kinerja (*performance related variable*) dan variabel-variabel pasar (*market related variables*). Penelitian ini menggunakan karakteristik kinerja perusahaan yang diproksi dalam profitabilitas, leverage, dan jenis industri.

2.4.5.1 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam satu periode pada tingkat penjualan, asset dan modal

saham tertentu. Profitabilitas dapat dinilai dengan berbagai cara yaitu dengan membandingkan laba dan atau aktiva dan modal dengan yang lainnya, seperti penjualan, investasi, ekuitas.

Profitabilitas diukur melalui margin laba bersih yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih per penjualan. Profitabilitas menghubungkan laba dan investasi menunjukkan efektivitas dalam menghasilkan laba melalui aktiva yang tersedia atau daya untuk menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan. Ada beberapa rasio yang digunakan dalam menilai profitabilitas yaitu *earning per share*, *return on asset*, *return on equity*, *net profit margin*, *gross profit margin*, *payout ratio*.

Profitabilitas menghubungkan laba bersih perseorangan dengan jumlah modal sendiri dalam perusahaan. Kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan modal sendiri dinamakan *return on equity* (Riyanto, 1998). ROE menunjukkan kesuksesan perusahaan dalam memaksimalkan pengembalian pemegang saham karena semakin baik rasio ini maka tingkat pengembalian kepada pemegang saha, juga semakin besar. Profitabilitas merupakan faktor yang memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada manajemen untuk melakukan dan mengungkapkan kepada pemegang saham program tanggung jawab secara lebih luas (Sembiring, 2005).

2.4.5.2 Leverage

Leverage mengukur sejauh mana sebuah perusahaan didanai oleh utang. Leverage adalah perbandingan antara dana-dana yang dipakai untuk membiayai

perusahaan atau perbandingan antara dana yang diperoleh dari kreditur dan dana yang disediakan sendiri oleh perusahaan. Leverage menunjukkan peran pendanaan utang bagi perusahaan dengan menunjukkan persentase aktiva, ekuitas dan modal perusahaan yang didukung dengan pendanaan utang.

Leverage merupakan pengukur ketergantungan perusahaan terhadap pinjaman untuk membiayai aset dan ekuitas. Perusahaan yang memiliki tingkat leverage tinggi memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pinjaman. Bank Dunia mensyaratkan adanya informasi mengenai kinerja lingkungan bagi perusahaan yang ingin mendapatkan pinjaman, hal ini dilakukan untuk melindungi dan melestarikan lingkungan.

2.4.6 Jenis Industri

Jenis industri adalah jenis entitas bisnis berdasarkan sektor usaha yang digerakkan. Bursa Efek Indonesia (BEI) membagi jenis industri menjadi tiga sektor yaitu sektor primer (utama), sekunder (manufaktur), dan tersier (jasa). Ketiga sektor ini dibagi menjadi sembilan sub sektor yaitu pertanian, pertambangan, industri dasar dan kimia, aneka industri, industri barang konsumsi, property, real estate, keuangan, perdagangan, jasa dan investasi.

Hasibuan (2001) membagi industri dua jenis utama yaitu industri *high profile* dan *low profile*. Industri yang tergolong *high profile* adalah perminyakan, pertambangan, kimia, hutan, otomotif, agrobisnis, tembakau dan rokok, makanan dan minuman, media dan komunikasi, kesehatan, transportasi dan pariwisata. Industri yang tergolong industri *low profile* adalah bangunan, keuangan dan

perbankan, supplier peralatan medis, retailer tekstil, produk personal dan produk rumah tangga.

Dalam penelitian ini jenis industri dikelompokkan menjadi dua, yaitu ekstraktif dan non ekstraktif. Perusahaan ekstraktif merupakan jenis industri yang mengambil bahan baku dari alam untuk diolah lebih lanjut. Perusahaan yang tergolong dalam kategori ekstraktif adalah pertambangan, penebangan kayu, pengambilan kekayaan laut. Jenis industri dikelompokkan menjadi ekstraktif dan non ekstraktif karena perusahaan ekstraktif berhubungan langsung dengan alam (lingkungan) dan cenderung mengeksploitasi kekayaan alam sehingga sering menimbulkan kerusakan lingkungan dalam melakukan aktivitas usahanya. Oleh sebab itu, perusahaan tersebut seharusnya memiliki kinerja lingkungan yang lebih baik.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai tanggung jawab sosial perusahaan banyak mengalami perkembangan, baik mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial, pelaporan *sustainability report*, dan juga pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan terutama dalam kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan dan pengungkapannya. Berikut ini merupakan beberapa ringkasan penelitian sebelumnya yaitu

Tabel 2.2
Ringkasan Penelitian Terdahulu

Peneliti	Alat Analisis	Variabel	Hasil Penelitian
Hackston dan Milne (1996)	Regresi Berganda	High profile, low profile, ukuran perusahaan, profitabilitas, tipe industri dan pengungkapan tanggung jawab sosial	Ukuran dan tipe industri berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Profitabilitas berpengaruh tidak signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial
Hasibuan (2001)	Regresi Berganda	besaran rasio, kepemilikan publik, profile perusahaan, jenis industri, dan basis perusahaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial	Besaran dan profile perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sosial. Kepemilikan publik, basis perusahaan dan jenis industri tidak signifikan terhadap pengungkapan sosial
Al-Tuwaijiri, Christensen, Hughes II (2003)	Regresi Berganda	<i>Economic performance</i> dan <i>enviromental performance</i> , dan <i>enviromental disclosure</i> .	<i>Economic performance</i> dan <i>enviromental disclosure</i> berhubungan positif signifikan terhadap <i>enviromental performance</i>
Sembiring (2005)	Regresi Berganda	ukuran perusahaan, profitabilitas, profile perusahaan, ukuran dewan komisaris, leverage dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan	Ukuran dewan komisaris, profile dan jenis perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Profitabilitas dan leverage berpengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial

Sarumpaet (2005)	Regresi Berganda	kinerja lingkungan PROPER, kinerja keuangan	Kinerja lingkungan tidak berhubungan terhadap kinerja keuangan perusahaan
Suratno, Darsono dan Mutmainah (2007)	Regresi OLS	Kinerja lingkungan, pengungkapan lingkungan dan kinerja keuangan	Kinerja lingkungan berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan lingkungan. Kinerja lingkungan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja ekonomi
Pahuja (2009)	Regresi Berganda	Kinerja dan pengungkapan lingkungan, sektor perusahaan, jenis industri, kepemilikan asing, kontrol bisnis, ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, ekspor.	Profitabilitas, ukuran perusahaan, jenis industri, dan kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan kinerja lingkungan.
Dunn dan Sainty (2009)	Regresi Berganda	Orientasi pemegang saham, dewan independen, leverage, kinerja sosial, variabel kontrol: ukuran perusahaan	Dewan independen, orientasi pemegang, leverage, dan orientasi pemegang saham berhubungan positif dengan kinerja sosial perusahaan.

Hackston dan Milne (1996) melakukan penelitian mengenai karakteristik perusahaan dan pengungkapan sosial. Penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang *high profile* lebih banyak melakukan pengungkapan daripada *low profile*. Ukuran dan tipe industri berpengaruh signifikan terhadap

pengungkapan tanggung jawab sosial sedangkan profitabilitas berpengaruh tidak signifikan.

Hasibuan (2001) melakukan penelitian pengaruh karakteristik terhadap pengungkapan sosial dalam laporan tahunan. Karakteristik yang digunakan adalah besaran rasio, kepemilikan publik, profile perusahaan, jenis industri, dan basis perusahaan. Penelitian menunjukkan bahwa besaran dan profile perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kuantitas pengungkapan sosial perusahaan sedangkan kepemilikan publik, basis perusahaan dan jenis industri menunjukkan hasil tidak signifikan. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda.

Al Tuwajiri *et al* (2003) menguji hubungan *economic performance*, *enviromental performance*, dan *enviromental disclosure*. Penelitian yang dilakukan, menemukan bahwa ada hubungan signifikan positif antara *economic performance* dan *enviromental performance*, dan hubungan signifikan antara *enviromental disclosure* dan *enviromental performance*, *enviromental performance*.

Sembiring (2005) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, profile perusahaan, ukuran dewan komisaris, dan leverage terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Dari penelitian ini ditemukan bahwa pengaruh ukuran perusahaan, profile perusahaan, dan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda.

Sarumpaet (2005) meneliti hubungan antara kinerja lingkungan, kinerja keuangan perusahaan Indonesia. Penelitian ini menggunakan kinerja lingkungan yang diukur dengan menggunakan PROPER. Berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa hubungan tidak signifikan antara kinerja lingkungan dan kinerja keuangan perusahaan. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda.

Suratno *et al* (2007) meneliti pengaruh kinerja lingkungan terhadap pengungkapan lingkungan dan kinerja ekonomi. Penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan lingkungan, dan kinerja lingkungan berpengaruh secara positif signifikan terhadap kinerja ekonomi. Penelitian menggunakan alat analisis regresi OLS (*ordinary least square*).

Pahuja (2009) meneliti hubungan antara pengungkapan lingkungan dan karakteristik perusahaan pada perusahaan manufaktur. Penelitian ini menunjukkan variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, jenis industri, dan kinerja lingkungan berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan. Perusahaan yang melakukan kinerja lingkungan yang lebih baik akan melakukan pengungkapan yang lebih banyak dibandingkan perusahaan yang kurang melakukan kinerja lingkungan.

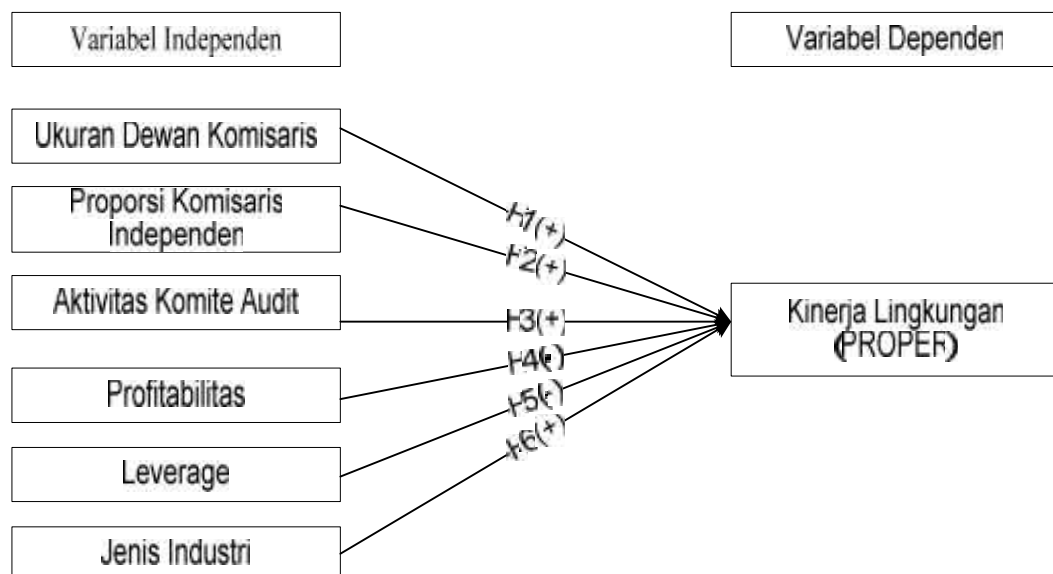
Dunn dan Sainty (2009) meneliti hubungan karakteristik dewan direksi, kinerja sosial dan kinerja keuangan perusahaan dan menemukan dewan independen berhubungan positif dengan kinerja sosial perusahaan serta kinerja sosial perusahaan berhubungan positif dengan kinerja keuangan perusahaan. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda.

Oleh sebab itu, penelitian ini dirancang berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu dengan menggabungkan beberapa model penelitian terdahulu. Penelitian ini berfokus pada kinerja lingkungan perusahaan yang diukur dengan menggunakan PROPER dihubungkan dengan mekanisme corporate governance dan karakteristik perusahaan. Mekanisme corporate governance yang diproksi dengan ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, dan aktivitas komite audit. Karakteristik perusahaan yang diproksi dengan profitabilitas, leverage dan jenis industri.

2.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

Penelitian ini meneliti hubungan mekanisme *corporate governance* dan karakteristik perusahaan terhadap kinerja lingkungan. Maka dibentuk kerangka pemikiran teoritis untuk mempermudah pemahaman penelitian ini sebagai berikut :

Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran Teoritis



2.7 Perumusan Hipotesis

2.7.1 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Kinerja Lingkungan

Teori agensi menyatakan bahwa prinsipal akan mengangkat agen untuk melakukan beberapa layanan bagi prinsipal dan untuk memaksimalkan nilai prinsipal (pemegang saham). Dalam hal ini, *corporate governance* didesain untuk memenuhi kepentingan pemegang saham (investor). Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap manajemen, tidak boleh melibatkan diri dalam tugas-tugas manajemen dan tidak boleh mewakili perusahaan dalam transaksi-transaksi dengan pihak ketiga (FCGI, 2002).

Dewan komisaris merupakan wakil para pemegang saham dalam mengawasi pengelolaan perusahaan dan mencegah pengendalian yang berlebihan oleh manajemen. Teori agensi menjelaskan bahwa ukuran dewan komisaris yang semakin besar akan memudahkan dilakukan pengendalian terhadap agen dan mencegah terjadinya penyimpangan. Pengawasan yang dilakukan dewan komisaris menjadikannya sebagai pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan (FCGI, 2002). Ukuran dewan komisaris yang besar akan meningkatkan kemampuan monitoring perusahaan dan berkontribusi untuk meningkatkan kinerja perusahaan (Pfeffer dan Salancik, 2003). Oleh sebab itu, perusahaan yang memiliki ukuran dewan komisaris semakin besar akan memiliki kinerja perusahaan yang semakin baik.

Sembiring (2003) menyatakan adanya hubungan positif ukuran dewan komisaris dengan pengungkapan kinerja lingkungan. Semakin besar ukuran dewan komisaris maka pengendalian dan monitoring yang dilakukan akan

semakin efektif sehingga tekanan terhadap manajemen untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan semakin besar.

Kassinis dan Vafeas (dikutip oleh Villiers, 2009) menyatakan perusahaan dengan anggota dewan yang lebih sedikit melakukan pelanggaran lingkungan yang lebih sedikit pula. Villiers *et al* (2009) menemukan ada hubungan positif signifikan antara ukuran dewan dengan kinerja lingkungan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dirumuskan adalah:

H₁ Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja lingkungan.

2.7.2 Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Kinerja Lingkungan

Melalui beberapa penelitian ditemukan bahwa dewan independen memiliki peranan penting dalam memonitor manajemen. Baysinger dan Butler (1985) menemukan perusahaan yang memiliki dewan independen yang lebih besar, memiliki kinerja yang unggul. Dalam perspektif teori agensi, kehadiran dewan independen dimaksudkan untuk mengurangi konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen perusahaan (Solomon, 2007). Tata kelola perusahaan akan diperkuat oleh anggota independen karena cenderung tidak akan diatur oleh manajemen perusahaan.

Dunn dan Sainty (2009) menemukan hubungan positif antara dewan dewan independen dengan kinerja sosial perusahaan perusahaan. Perusahaan yang memiliki dewan independen lebih peka terhadap kinerja sosial dan memiliki peringkat kinerja sosial yang lebih baik dibandingkan yang dependen. Villiers *et al* (2009) adanya hubungan positif antara dewan independen dengan kinerja

lingkungan karena direksi independen dinilai efektif dalam memonitor kinerja lingkungan. McKendal *et al* (dikutip oleh Villiers, 2009) menyatakan bahwa dewan independen cenderung kritis menilai keputusan manajemen tentang kegiatan lingkungan dan mencegah tindakan yang dapat menyebabkan pelanggaran lingkungan sehingga tercipta kinerja lingkungan yang lebih baik. Oleh sebab itu, berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang dirumuskan adalah:

H₂ Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja lingkungan.

2.7.3 Pengaruh Aktivitas Komite Audit terhadap Kinerja Lingkungan

Dalam melaksanakan aktivitasnya, komite audit akan melakukan rapat untuk melakukan koordinasi. Semakin banyak frekuensi rapat komite audit maka koordinasi komite audit dalam melakukan pengawasan semakin baik, termasuk dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dan kinerja lingkungan. Said *et al* (2009) menemukan adanya pengaruh komite audit terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Berdasarkan penelitian sebelumnya hipotesis yang akan digunakan adalah :

H₃ Aktivitas komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja lingkungan.

2.7.4 Pengaruh Profitabilitas terhadap Kinerja Lingkungan

Profitabilitas kerap kali dijadikan tolak ukur kinerja perusahaan. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi dianggap memiliki kinerja perusahaan yang baik. Namun, saat ini keberhasilan perusahaan tidak dinilai

hanya melalui kinerja keuangan saja melainkan bagaimana perusahaan juga melakukan tanggung jawab sosialnya terhadap lingkungan.

Teori legitimasi menyatakan bahwa pada saat margin laba tinggi maka perusahaan akan memilih untuk tidak melaporkan informasi kinerja sosial dan lingkungan karena perusahaan menganggap tidak perlu melaporkan hal-hal yang dapat mengganggu informasi kesuksesan perusahaan. Jika margin laba rendah maka perusahaan diharapkan untuk melakukan kinerja lingkungan yang lebih baik dan melakukan pengungkapan sehingga investor akan tertarik untuk berinvestasi di perusahaan (Donovan dan Gibson dalam Sembiring (2003)).

Belkaoui dan Karpik (1989) menyatakan perusahaan dengan profitabilitas tinggi tidak perlu melakukan pengungkapan sosial karena akan berdampak pada kerugian kompetitif dengan mengeluarkan biaya tambahan untuk melakukan pengungkapan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan berpengaruh negatif terhadap kinerja lingkungan perusahaan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dirumuskan adalah :

H₄ Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap kinerja lingkungan

2.7.5 Pengaruh Leverage terhadap Kinerja Lingkungan Leverage

Leverage menunjukkan sejauh mana perusahaan menggunakan uang pinjaman dan dibiayai oleh utang. Menurut teori agensi, perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi akan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial yang lebih agar perusahaan tidak menjadi bahan sorotan para kreditur (Jensen dan Meckling, 1976). Pahuja (2009) menyatakan perusahaan dengan leverage tinggi akan lebih mengungkapkan informasi lingkungan dibandingkan

perusahaan dengan leverage yang rendah. Perusahaan dengan hutang yang lebih besar akan melakukan aktivitas tanggung jawab sosial dengan tujuan menunjukkan informasi yang baik mengenai jangka panjang perusahaan (Arkelof, 1970).

Belkaoui dan Karpik (1989) menemukan hubungan negatif antara leverage dan pengungkapan tanggung jawab sosial. Perusahaan dengan leverage tinggi cenderung melakukan pengurangan biaya-biaya agar laba yang dilaporkan lebih tinggi termasuk biaya untuk mengungkapkan informasi sosial. McGuire (1988) menyatakan adanya hubungan negatif antara leverage dan skor tanggung jawab sosial karena perusahaan yang memiliki kinerja yang baik (utang yang rendah) lebih mampu melakukan tanggung jawab sosialnya .

Dunn dan Sainty (2009) juga menemukan adanya hubungan negatif antara kinerja sosial perusahaan dan leverage. Hal ini menunjukkan semakin tinggi rasio utang atau modal maka semakin rendah kinerja sosialnya karena semakin tinggi tingkat leverage karena semakin besar kemungkinan perusahaan akan melanggar perjanjian hutang. Godfrey (2005) perusahaan dengan hutang lebih besar akan lebih terlibat dalam kegiatan tanggung jawab sosial untuk menunjukkan informasi positif perusahaan. Dari uraian diatas maka hipotesis yang dirumuskan adalah:

H₅ Leverage berpengaruh negatif terhadap kinerja lingkungan.

2.7.6 Pengaruh Jenis Industri terhadap Kinerja Lingkungan

Industri yang sensitif terhadap lingkungan memandang manajemen dan kinerja lingkungan sebagai sesuatu yang penting dibandingkan industri yang lain.

Selain itu, industri ini juga diharapkan secara efektif memajemen dampak operasi perusahaan terhadap lingkungan yang tercermin melalui kinerja lingkungan yang lebih baik (Villiers *et al*, 2009)

Penelitian yang dilakukan Dierkes dan Preston (dikutip oleh Hackston dan Milne, 1996) menemukan kegiatan ekonomi perusahaan yang berdampak terhadap lingkungan, seperti industri ekstraktif, lebih banyak melakukan pengungkapan informasi tanggung jawab sosial perusahaan dibandingkan dengan industri lain. Cho dan Pattern (2007) menemukan bahwa perusahaan yang sensitif terhadap lingkungan akan melakukan pengungkapan lingkungan lebih dari kinerja lingkungan mereka, hal ini terjadi terutama pada perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan yang buruk. Penelitian di Australia yang dilakukan oleh Kelly (1981) menemukan bahwa industri primer dan sekunder cenderung lebih banyak mengungkapkan informasi mengenai lingkungan dibandingkan dengan industri tersier. Dengan perusahaan melakukan pengungkapan lingkungan secara otomatis perusahaan telah melakukan kinerja lingkungan, sehingga dari uraian diatas dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₆ Jenis Industri berpengaruh positif terhadap kinerja lingkungan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional

Dalam menguji pengaruh *good corporate governance* dan karakteristik perusahaan terhadap kinerja lingkungan (*environmental performance*) pada penelitian ini menggunakan beberapa variabel. Variabel ini dibagi menjadi dua, yaitu variabel dependen dan independen. Variabel adalah sifat yang akan diukur dan diamati nilai variasinya antara satu objek ke objek lainnya.

3.1.1 Variabel Dependen

Variabel dependen (terikat) disebut juga variabel kriteria, respon adanya output (hasil). Variabel ini merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat adanya variabel independen (bebas). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja lingkungan (*enviromental performance*) berdasarkan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER). Peringkat kinerja PROPER dibagi menjadi lima peringkat warna yaitu:

1. Emas : Sangat baik skor = 5
2. Hijau : Baik skor = 4

3. Biru : Cukup baik skor = 3
4. Merah : Buruk skor = 2
5. Hitam : Sangat buruk skor = 1

3.1.2 Variabel Independen

3.1.2.1 Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran Dewan Komisaris merupakan jumlah seluruh anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Ukuran dewan komisaris dapat diukur dengan menghitung jumlah total anggota dewan komisaris disajikan dan dapat dilihat dalam *annual report* perusahaan.

3.1.2.2 Proporsi Komisaris Independen

Proporsi minimal komisaris independen adalah 30% dari keseluruhan anggota dewan komisaris. Kriteria komisaris independen adalah komisaris yang berasal dari luar emiten, tidak mempunyai saham emiten baik langsung maupun tidak langsung, tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan komisaris, direksi, dan pemegang saham. Proporsi Komisaris Independen merupakan rasio antara jumlah anggota komisaris independen dengan total keseluruhan anggota dewan komisaris. Jumlah anggota komisaris independen dapat dilihat *annual report* perusahaan.

$$\text{komisaris independen} = \frac{\text{jumlah anggota komisaris independen}}{\text{jumlah seluruh anggota dewan komisaris}}$$

3.1.2.3 Aktivitas Komite Audit

Aktivitas komite audit diproksi dengan menggunakan jumlah rapat komite audit karena dalam aktivitasnya dalam perusahaan, komite audit akan melakukan rapat untuk melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

Jumlah rapat komite audit merupakan jumlah rapat yang dilakukan komite audit selama satu tahun. Dalam aturan BAPEPAM komite audit sekurang-kurangnya melakukan rapat sekali dalam sebulan. Jumlah rapat komite audit diukur dengan melihat jumlah rapat yang dilakukan selama satu tahun yang disajikan dalam *annual report* perusahaan.

3.1.2.4 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba untuk meningkatkan nilai pemegang saham. Ada beberapa rasio yang digunakan dalam menilai profitabilitas yaitu *earning per share*, *return on asset*, *return on equity*, *net profit margin*, *gross profit margin*, *payout ratio*. Ukuran profitabilitas yang digunakan adalah tingkat pengembalian ekuitas pemilik (*return on equity*).

$$\text{Return on equity} = \frac{\text{laba bersih}}{\text{ekuitas}}$$

3.1.2.5 Leverage

Leverage mengukur sejauh mana perusahaan bergantung pada hutang. Leverage menunjukkan ketergantungan perusahaan pada kreditor. Ada beberapa rasio

leverage yaitu *debt to asset*, *debt to equity*, *equity multiplier*, *interest coverage*. Rasio leverage yang digunakan merupakan rasio total utang terhadap total aset (*debt to asset*). Rasio ini menunjukkan persentase aset perusahaan yang didukung dari hutang.

$$Debt\ to\ asset = \frac{total\ hutang}{total\ aset}$$

3.1.2.6 Jenis Industri

Jenis industri dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu industri ekstraktif dan non ekstraktif. Jenis industri merupakan variabel dummy. Industri yang tergolong ekstraktif diberi skor 1 dan industri non ekstraktif diberi skor 0.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi sampel merupakan seluruh perusahaan yang tergabung dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) dan terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011. Populasi penelitian ini merupakan perusahaan yang tergabung dalam PROPER karena penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh kinerja lingkungan perusahaan yang dapat dilihat dari peringkat warna perusahaan dalam PROPER. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Perusahaan yang tergabung dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) dan juga terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2010 dan 2011.
2. Perusahaan yang telah menerbitkan laporan tahunan perusahaan untuk periode 2010 dan 2011
3. Perusahaan yang memiliki informasi keuangan yang lengkap sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu data yang sudah diolah dalam bentuk jadi dan dipublikasikan. Data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan yang dipublikasikan melalui situs perusahaan maupun melalui Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010 dan 2011 dan situs Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

3.4 Metode Analisis

3.4.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean). Adapun statistik deskriptif menggambarkan standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi).

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

3.4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji F dan t mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi dilanggar maka uji statistik tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. (Ghozali, 2009).

Normalitas residual dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik histogram yang membandingkan data observasi dengan distribusi yang mendekati normal. Namun, pengujian dengan melihat data histogram dapat menyesatkan khususnya untuk sampel kecil. Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik dengan melihat histogram residualnya. Adapun dasar pengambilan keputusan (Ghozali, 2009) :

- a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya digunakan pola distribusi normal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas
- b. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/ atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan kalau tidak hati-hati secara visual kelihatan normal, pada hal secara statistik bisa sebaliknya. Oleh sebab itu, disamping uji grafik perlu dilakukan uji statistik. Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Adapun dasar pengambilan keputusan uji statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S) adalah:

- a. Jika nilai *Asymp Sig (2 tailed)* lebih kecil dari 0.05 maka H_0 ditolak. Hal ini berarti data residual tidak berdistribusi normal.
- b. Jika nilai *Asymp Sig (2 tailed)* lebih besar dari 0.05 maka H_0 ditolak. Hal ini berarti data residual berdistribusi normal.

3.4.2.2 Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel dependen. Jika variabel independen saling berkorelasi maka variabel-variabel ini tidak saling ortogonal, variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk melihat ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari hal berikut (Ghozali, 2009):

- a. Nilai R^2 yang dihasilkan dari suatu regresi empiris sangat tinggi tetapi secara individual variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel independen
- b. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0.9) maka mengindikasikan adanya multikolonieritas.
- c. Multikolonieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan dengan oleh variabel independen lainnya. Nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi ($VIF = 1/Tolerance$). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas nilai $Tolerance \leq 0.10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$ (Ghozali, 2009).

3.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda maka heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas, dengan kata lain tidak heteroskedastisitas. Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau heteroskedastisitas (Ghozali, 2009):

- a. Melihat Grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residual SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas

dapat dilihat dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED.

- b. Jika ada pola tertentu pada grafik scatterplot seperti titik-titik yang membentuk pola teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan adanya heteroskedastisitas.
- c. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y grafik scatterplot maka mengindikasikan tidak ada heteroskedastisitas.

Analisis dengan grafik memiliki kelemahan karena jumlah pengamatan mempengaruhi hasil plotting. Oleh sebab itu, maka diperlukan uji statistik yang lebih akurat. Alat uji statistik yang digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah Uji Glejser dengan persamaan sebagai berikut:

$$|U_t| = \alpha + \beta X_t + v_t$$

3.4.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah yang bebas dari autokorelasi. Uji Durbin dan Watson digunakan untuk menguji autokorelasi adalah (Ghozali, 2009):

Apabila $0 < d < d_l$, maka tidak ada autokorelasi positif, keputusan ditolak

Apabila $d_l < d < d_u$, maka tidak ada autokorelasi positif, tidak ada keputusan

Apabila $(4-dl) < d < 4$, maka tidak ada korelasi negatif, tolak

Apabila $(4-du) < d < (4-dl)$, maka tidak ada korelasi negatif, tidak ada keputusan

Apabila $du < d < 4-du$, maka tidak ada autokorelasi positif-negatif, tidak ditolak.

3.4.3 Analisis Regresi Berganda

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS. Analisis regresi merupakan studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen dan menunjukkan arah hubungan variabel dependen dan independen. Hasil analisis regresi berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen.

Analisis regresi linear berganda ini digunakan untuk menunjukkan arah hubungan (pengaruh) variabel dependen (kinerja lingkungan) dan variabel independen (karakteristik perusahaan dan tata kelola perusahaan). Adapun persamaan regresi yang digunakan adalah :

$$Y = \alpha_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + e \quad (3.4)$$

Keterangan:

- Y : kinerja lingkungan yang diukur melalui peringkat PROPER
- α_0 : konstanta
- X_1 : ukuran dewan komisaris
- X_2 : proporsi komisaris independen
- X_3 : jumlah rapat komite audit
- X_4 : profitabilitas (*return on equity*)

X_5	: leverage (<i>debt to asset</i>)
X_6	: jenis industri, 1 untuk industri ekstraktif dan 0 untuk lainnya
β_{1-6}	: koefisien regresi
e	: error

3.4.4 Uji Hipotesis

3.4.3.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2009).

3.4.3.2 Uji Signifikansi Simultan (F test)

Uji statistik f menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama–sama terhadap variabel independen. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%. Jika nilai signifikansi $f < 0,05$ artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara semua variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi $f > 0,05$ artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2009).

3.4.3.3 Uji Signifikansi Parsial (T test)

Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2009). Tingkat signifikan 5%, maka kriteria pengujian adalah :

1. Bila nilai signifikan $t < 0.05$ maka H_0 ditolak, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terdapat satu variabel dependen
2. Apabila nilai signifikan $t > 0.05$, maka H_0 diterima artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terdapat variabel dependen.